

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah

1. Upah Minimum

Upah diartikan oleh Imam Soepomo yaitu pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dipandang dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁸

Upah merupakan hal yang sensitif serta kompleks, karena upah sangat menentukan lajunya perusahaan. Upah juga merupakan hal yang paling menimbulkan perselisihan antara majikan dengan buruh. Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Untuk melindungi pekerja, yang biasanya adalah pihak lemah, maka pemerintah ikut menentukan menetapkan sistem pengupahan yang berlaku. Di Indonesia telah ditetapkan upah minimum secara bertahap menurut kemampuan ekonomi, regional maupun sektoral yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja. Upah minimum sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL).

⁸ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 2016), hlm 179

Upah merupakan hak buruh sebagai akibat adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam pengupahan ada asas umum yang berlaku yaitu asas *No Work No Pay*, yang artinya pekerja/buruh tidak akan dibayar jika tidak melakukan pekerjaan. Tetapi asas ini tidak berlaku mutlak dalam bidang pengupahan, ada pengecualian dalam pelaksanaannya antara lain saat pekerja/buruh dalam keadaan sakit, cuti, melaksanakan tugas negara dan lain-lain, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tetapi perlu diketahui juga sebagai sejarah hukum bahwa Hukum Ketenagakerjaan dahulunya mengacu kepada KUHPerduta buku ke III, bab VIIA mulai Pasal 1601 sampai Pasal 1617. Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka, sistem ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk tentang pengupahan mengacu pada UU Nomor 13 tahun 2003. Upah menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (1), upah yang ditentukan oleh pemerintah terbagi atas: upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kota, dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kota.

Sebelum Upah Minimum Kota (UMK) ditetapkan ada tahapan yang harus dilakukan dalam proses penentuan Upah Minimum Kota (UMK).

Tahapan tersebut di antaranya adalah melakukan survey pasar tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota, yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi dengan perbandingan 2-1-1 (2 dari pemerintah, 1 dari pengusaha, dan 1 dari pekerja).

Hasil survey tersebut kemudian ditetapkan sebagai salah satu dasar dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK). Setelah hasil KHL selesai dibahas dalam rapat pleno, kemudian Dewan Pengupahan Kota melakukan rapat untuk menentukan UMK yang akan direkomendasikan kepada Bupati/Walikota, setelah menerima rekomendasi tersebut maka Bupati/Walikota akan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Dewan Pengupahan Provinsi.

Fungsi dan tugas Dewan Pengupahan Provinsi adalah pemeriksaan terhadap rekomendasi dari Bupati/Walikota, apakah sudah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika semua tahapan tersebut telah selesai, maka Dewan Pengupahan Provinsi akan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi UMK (Upah Minimum Kota).⁹

Fakta yang terjadi di lapangan, proses penetapan UMK banyak menemui hambatan, bahkan tidak jarang pula terdapat indikasi pelanggaran terhadap tahapan dan mekanisme penetapannya. Tidak hanya berhenti

⁹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Djambatan, 2016), hlm. 7

sampai di situ, setelah UMK ditetapkan oleh Gubernur, dalam prakteknya di tingkat perusahaan tidak jarang menemui banyak kendala bahkan terdapat pula indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan UMK tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah masih ada perusahaan/pengusaha yang tidak mau membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering digunakan oleh pengusaha adalah bahwa perusahaan mengalami kemunduran dan UMK yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga pengusaha tidak mampu untuk membayar upah sesuai yang ditetapkan pemerintah. Padahal UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur dengan tegas dan jelas bahwa pengusaha tidak boleh membayar upah kepada pekerja/buruh lebih rendah dan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.*"

Upah minimum memang menjadi salah satu isu sensitif baik bagi akademisi dan pengambil kebijakan. Para pendukung kenaikan upah minimum meyakini bahwa kenaikan upah minimum bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan khususnya pada golongan dengan pendapatan rendah. Namun, di satu sisi banyak pihak yang percaya bahwa upah akan menyesuaikan dengan mekanisme pasar sehingga tidak perlu ada

kebijakan upah minimum. Menurut mereka, upah minimum hanya akan membuat kekakuan pasar dan tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Upah yang terlalu tinggi akan membuat iklim usaha kurang baik, tingginya upah akan membuat beban perusahaan semakin besar sehingga tidak mampu bersaing dan pada akhirnya untuk bertahan perusahaan akan memilih untuk mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hak kerja atau memindahkan pabrik keluar daerah dengan upah yang lebih rendah. Namun di sisi lain upah juga harus sesuai dengan standar biaya hidup minimum karena bagaimanapun hak-hak pekerja tidak bisa diabaikan. Disebabkan hal tersebut maka kebijakan mengenai upah minimum yang ditetapkan otoritas harus benar-benar mengakomodasi pengusaha dan buruh. Di satu sisi harus tidak membebankan pengusaha dan di lain harus menjamin kelayakan hidup pekerja. Beberapa studi memperlihatkan jika peningkatan upah minimum berpengaruh positif terhadap meningkatnya pengangguran, misalnya studi di negara OECD menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum sebesar 10% akan mengurangi tenaga kerja sebesar 0,7% dan meningkatkan pengangguran sebesar 0,64%.¹⁰

¹⁰ Mochamad Rofik, *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat*, (Jurnal Inovasi Ekonomi, Vol. 03 No. 02 September 2018), hlm. 46

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.¹¹ Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.¹²

Laju inflasi merupakan gabungan harga-harga. Harga yang melambung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara itu, harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Kenaikan harga ini diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

a. Indeks biaya hidup (*consumer price indeks*)

Indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat

¹¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 27

¹² Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2011), hlm. 9

bermacam-macam. Di Indonesia dikenal dengan indeks 9 bahan pokok, 62 barang serta 162 macam barang. Karena masing-masing barang dan jasa tersebut bagi masing-masing seseorang tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka tertentu. Angka pertimbangan biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan.

Besarnya prosentase ini dapat diubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu direvisi apabila ternyata terdapat perubahan. Misalnya dengan adanya listrik masuk desa, maka prosentase pengeluaran untuk minyak tanah terhadap pengeluaran total menjadi kecil. Dengan perubahan angka penimbang ini maka indeks harganya pun akan berubah. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung prosentase kenaikan atau penurunan indeks harga ini dari tahun ke tahun (atau dari bulan ke bulan).

$$\text{laju inflasi} = \frac{\text{laju inflasi (tahun)} - \text{laju inflasi tahun sebelumnya}}{\text{laju inflasi tahun sebelumnya}}$$

b. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price indeks*)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga ini sejalan atau searah dengan indeks biaya hidup.

c. GNP deflator

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain, berbeda dengan dua indeks di atas dalam cangkupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam penghitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila dibanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP normal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP rill (di atas harga konstan).¹³

$$GNP\ deflator = \frac{GNP\ normal}{GNP\ rill} \times 100$$

2. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori tersebut di antaranya adalah teori kuantitas, teori kynes, teori strukturalis, dan teori make up model.¹⁴

a. Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan datang.

¹³ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2018), hlm. 26

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2015), hlm.

b. Teori Kynes

Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Dalam teorinya, Kynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonomisnya. Proses perebutan rizki antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Jika hal ini terus terjadi maka selama itu pula proses inflasi akan berlangsung.

Yang dimaksud dengan golongan masyarakat di sini adalah: 1) Pemerintah, yang melakukan mencetakan uang baru untuk menutup deficit anggaran belanja Negara; 2) Pengusaha swasta, yang menambah investasi baru dengan kredit yang mereka peroleh dari bank; 3) Pekerja atau serikat buruh, yang menuntut kenaikan upah melebihi pertambahan produktivitas.

Tidak semua golongan masyarakat berhasil memperoleh tambahan dana, karena penghasilan mereka rata-rata tetap dan tidak bisa mengikuti laju inflasi, misalnya pegawai negeri, pensiunan, dan petani.

c. Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yaitu *cost of production* dan profit margin. Jadi apabila ada kenaikan

antara dua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

d. Teori Struktural

Teori ini juga bisa disebut dengan teori inflasi jangka panjang. Karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekuatan struktur ekonomi. Khususnya penawaran tahunan dan barang-barang ekspor.

3. Jenis-jenis Inflasi Berdasarkan Sumber atau Penyebabnya

Berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan berdasarkan pada tiga bentuk yaitu, inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, inflasi diimpor.

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

Di samping dalam masa perekonomian yang berkembang dengan pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah belanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk

membayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral.

Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akibatnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi perusahaan akan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena:¹⁵ 1) Perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji; 2) Usaha-usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya

¹⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 335

akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi.

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Salah satu contohnya adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya.

Kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 1970an (yaitu dari US\$30.00 pada tahun 1973 berubah menjadi US\$12.00 pada tahun 1974 menjadi US\$30.00 pada tahun 1979) menyebabkan masalah stagflasi yaitu inflasi ketika pengangguran tinggi diberbagai Negara.

Begitu juga menurut Indriani, jenis inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*) sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Akibat adanya permintaan total yang berlebihan mengakibatkan kenaikan harga hasil produksi (*output*). Inflasi desakan biaya (*Cost-push*

inflation) biasanya ditandai dengan kenaikan biaya produksi (*input*) serta turunnya produksi. Sehingga mengakibatkan harga produk (*output*) yang dihasilkan ikut naik.¹⁶

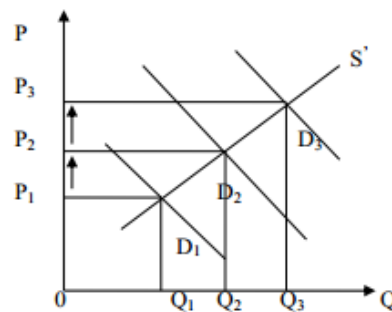
a. *Demand Pull Inflation*

Demand pull inflation, atau sering disebut sebagai (*demand-side inflation*) atau guncangan permintaan (*demand shock inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya daya tarik dari permintaan masyarakat akan berbagai barang yang terlalu kuat.¹⁷

Inflasi jenis ini biasanya dikenal juga sebagai *Philips curve inflation*. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi *output* potensinya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

Gambar 2.1

Demand Pull Inflation



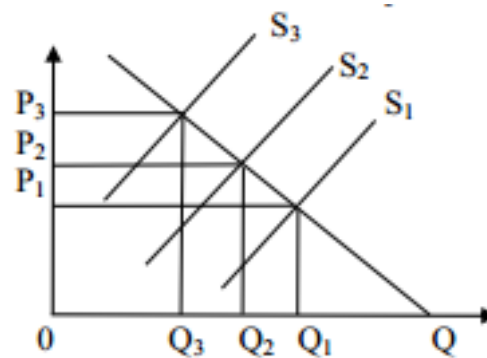
¹⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 336

¹⁷ *Ibid.*, 337

Pergeseran kurva permintaan barang dan jasa dari D1-D2 disebabkan karena adanya penambahan permintaan sebesar Q1-Q2 yang berakibat naiknya harga P1-P2. Jika permintaan terus bertambah ke Q2-Q3 menyebabkan harga akan terus naik menjadi P2-P3, begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga terus-menerus yang menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi jenis inilah yang disebut sebagai *demand pull inflation*, dan inflasi jenis ini lebih mudah diatasi.

b. *Cost Push Inflation*

Cost push inflation, atau (*supply-side inflation*) atau sering disebut juga sebagai guncangan penawaran (*supply-shock inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya guncangan atau dorongan kenaikan biaya faktor-faktor produksi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor terjadinya *Cost Push Inflation* dapat disebabkan depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*) dan terjadi *negative supply shock* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Gambar 2.1***Cost Push Inflation***

Pergeseran kurva penawaran sebesar S_1 - S_2 karena adanya kenaikan biaya faktor produksi menggeser permintaan barang sebesar Q_1 - Q_2 yang berakibat naiknya harga barang P_1 - P_2 . Jika biaya produksi terus naik menjadi Q_2 - Q_3 , menyebabkan harga akan terus naik ke P_2 - P_3 , begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang terus menerus menjadi sulit untuk diturunkan, sehingga jenis inflasi ini relatif tidak mudah untuk diatasi.

4. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, maka inflasi dapat di bagi dalam tiga kategori yakni, menyerap (*creeping inflation*), menengah (*galoping inflation*) serta inflasi tinggi (*hyper inflation*).¹⁸ Creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah

¹⁸ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018), hlm. 26

(kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat yang akselerasi. Artinya harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang menyerap (*creeping inflation*).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang perputaran uang makin cepat, hanya naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai atau ditutup dengan cara mencetak uang.

Menurut Sukirno, penggolongan inflasi berdasarkan sifatnya dapat dilihat dari berbagai tingkatan yaitu:¹⁹

a. Inflasi ringan (*creeping inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

¹⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 339

b. Inflasi sedang/menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*, di antara 10%-30% pertahun) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi ringan.

c. Inflasi berat

Inflasi berat merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali (lebih dari 30% per tahun). Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi.

5. Efek Inflasi

Kenaikan harga yang tinggi dan terus-menerus dapat menimbulkan beberapa efek dalam kegiatan ekonomi, antara lain:

a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Inflasi akan menurunkan pendapatan orang-orang yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan

memperburuk pembagian kekayaan.²⁰ Contoh lain yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah orang atau pihak yang memberikan pinjaman uang dengan bunga lebih rendah daripada laju inflasi.

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan potensi yang lebih besar laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi. Adanya serikat buruh yang kuat kadang kala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan prosentase lebih besar dari laju inflasi.²¹

b. Efek Terhadap Efisien (*Efficiency Effect*)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut.

Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan merubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan

²⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 339

²¹ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2018), hlm. 32

tidak ada inflasi. Namun, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efektif.²²

c. Efek Terhadap Output (*Output Effects*)

Inflasi mungkin dapat menyebabkan kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biaya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi itu cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai efek sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi lebih mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Intensitas efek inflasi berbeda-beda tergantung apakah inflasi dibarengi dengan kenaikan produksi dan *employment* atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) intensitas efek inflasi makin

²² *Ibid.*, hlm. 33

besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).²³

6. Cara Mencegah Inflasi

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan nonmoneter.²⁴ Untuk mengatasi inflasi pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, yang pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua sifatnya lebih inflatoir daripada cara pertama, sebab cara pertama hanya pengalihan bentuk saja dari uang kas ke uang giral.

Bank sentral dapat mengukur uang giral melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah jumlah uang menjadi lebih kecil. Di samping cara ini, bank sentral dapat menggunakan apa yang disebut dengan tingkat diskonto (*diskonto rate*).

²³ *Ibid.*, hlm. 34

²⁴ *Ibid.*, hlm. 34

Diskonto rate adalah tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan kepada bank sentral untuk bank umum. Pinjaman ini biasanya berwujud tambahnya cadangan bank umum yang ada pada bank sentral. Discount rate ini bagi bank umum merupakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral.

Apabila tingkat diskonto dinaikkan (oleh bank sentral) maka gairah bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank sentral makin kecil. Akibatnya, kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah.

b. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

c. Kebijakan yang berkaitan dengan output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea

masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

d. Kebijakan penentuan harga dan indexing

Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji atau upah secara riil tetap). Kalau indeks harga naik, maka gaji atau upah juga dinaikkan.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori

pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital.²⁵

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.²⁶

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.²⁷

²⁵ Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, 2018), hlm. 44

²⁶ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4

²⁷ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hlm. 1

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.²⁸ Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal.²⁹ Dalam hal Ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka

²⁸ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.

²⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, : STIE YKPN, 2010), hlm. 12.

meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.³⁰ Ketiganya adalah:

- a. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi, yang mana akan dapat membatu kinerja.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).³¹

- a. Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat

³⁰ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 92

³¹ Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Jurnal Tahun 2017), hlm.12.

dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.

- b. Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
- c. Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

2. Teori-Teori Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Teori Ekonomi Klasik (Adam Smith) unsur pokok dari sistem produksi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia (jumlah dan

kualitas penduduk), dan stok modal.³² Menurut teori ini, sumber daya alam yang tersedia adalah batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Pada tahap dimana unsur sumber daya alam belum dimanfaatkan maksimal, maka peningkatan produksi akan ditentukan oleh sumber daya insani dan stok modal.

Apabila output terus meningkat, sumber daya alam akan sepenuhnya termanfaatkan. Pada tahap ini sumber daya alam membatasi pertumbuhan suatu perekonomian.³³ Unsur produksi kedua adalah jumlah penduduk. Menurut teori ini, jumlah penduduk bersifat pasif, akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya pertambahan penduduk akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Smith menempatkan peranan sentral unsur ketiga yaitu pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Menurut Smith, stok kapital mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total yaitu pengaruh langsung berupa penambahan kapital dan pengaruh tidak langsung berupa peningkatan produktivitas lewat dimungkinkannya peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja.

Makin besar stok kapital makin besar kemungkinan spesialisasi dan

³² Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hlm. 42

³³ *Ibid.*, hlm. 43

pembagian kerja, dan semakin tinggi produktivitas perpekerja.³⁴ Dua faktor penting terkait akumulasi kapital yaitu perluasan pasar dan tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.

Smith menggarisbawahi pentingnya perluasan dan kebebasan pasar (persaingan) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dilakukan dengan menghilangkan peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi.³⁵

a. Teori Pertumbuhan Klasik

David Recardo mengembangkan Teori Klasik Smith ke dalam model yang lebih tajam baik dalam konsep-konsep maupun dalam hal mekanisme proses pertumbuhan. Menurut Recardo dengan keterbatasan tanah, maka pertumbuhan penduduk akan menghasilkan produk marjinal (*marginal product*) semakin menurun yang lebih dikenal dengan *the law of diminishing return*.

Satu-satunya peluang untuk tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah kemungkinan kemajuan teknologi. Menurut Recardo proses pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara kedua kekuatan dinamis ini, yang akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return* sehingga, menurut teori ini, keterbatasan tanah akan

³⁴ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 2011), hlm. 43

³⁵ *Ibid.*, hlm 44

membatasi pertumbuhan ekonomi.³⁶

b. Model Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan)

Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi.³⁷ Analisis teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan tingkat penggunaan penuh (full utilization) dari faktor-faktor produksinya.

Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu. Teori Pertumbuhan Neoklasik yang disajikan dalam fungsi Cobb-Douglas menekankan peran pembentukan modal sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan.

Solow menekankan pertumbuhan jangka panjang dan peranan modal, tenaga serta teknologi sebagai faktor produksi.³⁸ Lebih jauh menurut Solow, pertumbuhan akan terjadi apabila ada modal, ada pertumbuhan penduduk dan ada teknologi, walaupun teknologi masih dianggap sebagai faktor eksogen. Dengan demikian fungsi produksi

³⁶ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 44

³⁷ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, : STIE YKPN, 2010), hlm. 33.

³⁸ Mankiw N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 67

dapat diformulasikan ke dalam persamaan berikut:

$$Y = F(K, L \times E)$$

Dimana E adalah variabel yang disebut efisiensi tenaga kerja. $L \times E$ mengukur jumlah para pekerja efektif yang memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif $L \times E$. Ini bermakna bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L.³⁹ Dalam model ini, tabungan akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong pencapaian perekonomian yang mapan akan tergantung pada kemajuan teknologi (eksogenous).

c. Model Pertumbuhan Endogen (Teori Pertumbuhan Baru)

Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan adalah menjelaskan kenaikan berkelanjutan standar kehidupan. Model Pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi dari mana kemajuan teknologi berasal dipandang sebagai faktor eksogen yang masih bersifat asumsi, yang sering disebut Residu Solow.

Selanjutnya muncul Teori Pertumbuhan Endogen yang

³⁹ Mankiw N. Gregory, Pengantar Ekonomi Makro, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 68

dikembangkan oleh Paul Romer pada akhir tahun 80-an. Teori ini memandang pertumbuhan ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi (endogenous) bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar sistem. Karenanya, teori ini memandang penting identifikasi dan analisis faktor-faktor yang berasal dari dalam (endogenous) sistem ekonomi, yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

Teori Pertumbuhan Endogen memerhatikan pengembalian modal dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Apabila fungsi produksi adalah $Y=AK$, dimana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, maka selanjutnya $\Delta K = sY - \delta K$, dimana ΔK adalah perubahan persediaan modal, sY adalah investasi dan δK adalah depresiasi, maka tingkat pertumbuhan output ditunjukkan oleh persamaan berikut.⁴¹

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta K}{K} = sA - \delta$$

Dimana $\frac{\Delta Y}{Y}$ adalah tingkat pertumbuhan output, $\frac{\Delta K}{K}$ adalah tingkat pertumbuhan modal. Selama $sA > \delta$ atau $sA - \delta$ lebih besar daripada satu, pertumbuhan perekonomian dapat berlangsung meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi.

⁴⁰ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.

⁴¹ Mankiw N. Gregory, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 73

Dalam Pertumbuhan Endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan berkesinambungan, dengan K (modal) diasumsikan secara lebih luas termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Teori Pertumbuhan Endogen menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besaran Δ yaitu tingkat pertumbuhan GDP yang tidak dijelaskan dan dianggap sebagai variabel eksogen dalam perhitungan Pertumbuhan Neoklasik Solow (Residu Solow).

Paul Romer menjelaskan tiga elemen dasar dalam pertumbuhan endogen yaitu perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan (*knowledge spillover*), dan produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.⁴²

Teori-teori di atas menempatkan faktor pertumbuhan ekonomi dalam bentuk modal (uang yang diinvestasikan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah) dan tenaga kerja sebagai faktor penting penentu pertumbuhan. Namun dalam menjamin pertumbuhan jangka panjang, peran teknologi menjadi hal penting.

3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo

⁴² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, : STIE YKPN, 2010), hlm. 52

Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:⁴³

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, dimana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat.

Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam

⁴³ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 91

pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *financial* Negara-negara di dunia.

Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.⁴⁴

1) Pendekatan produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:⁴⁵

- a) Pertanian
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, gas, dan air bersih
- e) Bangunan dan Konstruksi

⁴⁴ Katalog BPS, PDRB Tahun 2019, hlm. 7

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 10

- f) Perdagangan, hotel dan restoran
- g) Pengangkutan dan komunikasi
- h) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- i) Jasa-jasa lainnya

2) Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, dari:⁴⁶

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
- b) Konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- d) Pembentukan stok
- e) Ekspor netto (ekspor dikurang impor)

3) Pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

⁴⁶ Katalog BPS, PDRB Tahun 2019, hlm. 15

Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

4 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain:⁴⁷

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:⁴⁸

$$r(t - 1) = \frac{PRDBt - PRDB(t - 1)}{PRDBt - 1} \times 100\%$$

Ket:

$r(t-1)$ = Tingkat pertumbuhan ekonomi

⁴⁷ Laurensius Julian Purwanjana, *Rumus Praktis Menguasai Ekonomi*, (Yogyakarta:Pustaka Book, 2012). hlm 115.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 116

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

PDRB_(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.⁴⁹

⁴⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), hlm. 124

Menurut Abdurrahman Yusro,⁵⁰ pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh10-12.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) عَلَّ لَكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ نَّ وَيَجْ

جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَبَنِي (١٢)

Artinya: “10. Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, 11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”.⁵¹

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S Al-Ar'raaf 96 sebagai berikut.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”⁵²

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 139

⁵¹ Departemen Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 570.

⁵² *Ibid.*, hlm. 151

istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

6 Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah:⁵³

a. Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk

⁵³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), hlm. 142

mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b. Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi taupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi.

Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino. Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

- 1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan daei segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.

- 3) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syari'ah, yaitu:

- 1) Melarang royaltis konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
- 2) Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.
- 3) Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain
- 4) Melarang tindakan penimbunan (ikhtiar) dan ribawi
- 5) Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan

Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

c. Efisiensi produksi

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi

baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Urgensi pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar. Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar.

Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya *market share* yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB.

Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan

ekonomi.⁵⁴

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan kunjungan di berbagai situs skripsi secara online, sejauh ini belum menemukan penulis lain yang dengan karya berjudul “Pengaruh Tingkat Upah Minimum dan Inflasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kota Kediri.” Akan tetapi dari penelusuran itu, penulis banyak menemukan judul yang berkaitan dengan Upah minimum dan inflasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu:

1. Tesis Moh. Faizin yang berjudul Pengaruh Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) upah minimum berpengaruh signifikan

⁵⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), hlm. 143

terhadap penyerapan tenaga kerja, 2) upah minimum berpengaruh signifikan terhadap investasi, 3) penyerapan tenaga kerja dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 4) penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 5) investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁵

Persamaan penelitian terletak pada variabel independen tingkat upah minimum dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel independen penyerapan tenaga kerja, investasi, dan lokasi penelitian.

2. Jurnal Lokiman, Rotinsulu, dan Luntungan yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Swasta terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampaknya pada PRDB (ADHK) di Kota Manado.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis path. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) upah minimum berpengaruh terhadap tenaga kerja Kota Manado, 2) investasi tidak berpengaruh terhadap tenaga kerja, 3) pengaruh upah minimum terhadap PRDB

⁵⁵ Moh. Faizin, *Pengaruh Upah Minimum dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*, (Tesis Universitas Airlangga, 2015), hlm. 107

bersifat positif, 4) pengaruh investasi swasta terhadap PRDB bersifat negatif.⁵⁶

Persamaan penelitian terletak pada tingkat upah minimum dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (PRDB). Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel independen investasi, variabel dependen penyerapan tenaga kerja, dan lokasi penelitian.

3. Jurnal Maulina, Salim, dan Juliansyah yang berjudul Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁷

Persamaan penelitian terletak pada variabel independen inflasi dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel independen pengangguran dan lokasi penelitian.

4. Jurnal Yulianti dan Khairuna yang berjudul Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode 2015-2018 dalam Pespektif Ekonomi Islam.

⁵⁶ Dasri Lokiman, Debby Ch. Rotinsulu dan Antonius Y. Luntungan, Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi Swasta terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampaknya pada PRDB (ADHK) di Kota Manado Tahun 2003-2012, (Jurnal *IEP – FEB Unsrat Manado*, 2018), hlm. 60

⁵⁷ Rina Maulina, Jul Fahmi Salim, dan Rollis Juliansyah, Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi, (Jurnal *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar Meulaboh dan Universitas Syiah*, 2018), hlm. 53

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵⁸ Persamaan penelitian terletak pada variabel independen inflasi dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel independen, penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel UMK, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel independen yaitu inflasi.

5. Jurnal Prima Audia Daniel yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi.

Metode penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi masih cenderung fluktuasi dan belum stabil, 2) inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi, 3) inflasi mempunyai korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.⁵⁹

Persamaan penelitian ini terletak pada variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel independen dan lokasi penelitian.

⁵⁸ Rahmah Yulianti dan Khairuna, Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Periode 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal *Akuntansi Muhammadiyah*, Vol. 9 No. 2, 2019), hlm. 122

⁵⁹ Prima Audia Daniel, Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi, (Ekonomis: *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 2 No.1, 2018), hlm.136

6. Jurnal Wijayanti dan Karmini yang berjudul Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali, sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali.⁶⁰

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan diadakan adalah pada variabel tingkat inflasi dan upah minimum pada variabel independen. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, variabel laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel independen pada penelitian terdahulu, dan menjadi variabel dependen pada penelitian yang akan dilakukan.

⁶⁰ Ni Nyoman Setya Ari Wijayanti dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali, (*E-Jurnal EP Unud*, Volume 3 No. 10, 2018), hlm. 465

7. Penelitian dari Said yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Makasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian, 1) variabel upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dengan nilai signifikan ($0,018 < 0,05$), nilai konstanta upah minimum regional $-3,756$. Variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran dengan nilai signifikan ($0,034 < 0,05$), nilai konstanta investasi $1,936$. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran dengan nilai signifikan ($0,007 < 0,05$), nilai konstanta pertumbuhan ekonomi sebesar $-1,844$.⁶¹

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan diadakan adalah pada variabel tingkat inflasi dan upah minimum pada variabel independen. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, variabel laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel independen pada penelitian terdahulu, dan menjadi variabel dependen pada penelitian yang akan dilakukan.

⁶¹ Nurhikmah Risvi Said, Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Makasar, (*Penelitian Universitas Alauddin Makasar*, 2017), hlm. 84

8. Jurnal Simanungkalut yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian, 1) Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini terlihat dari Hasil uji signifikan uji F, yang menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) Besarnya pengaruh yang diberikan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari Rsquare diketahui $R^2 = 0,747588$, artinya sebesar 74,7588% nilai pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inflasi sedangkan sisanya sebesar 25,2412% dipengaruhi oleh faktor lain.⁶²

Persamaan penelitian terletak pada variabel independen inflasi dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jumlah variabel independen, penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel UMK, sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel independen yaitu inflasi.

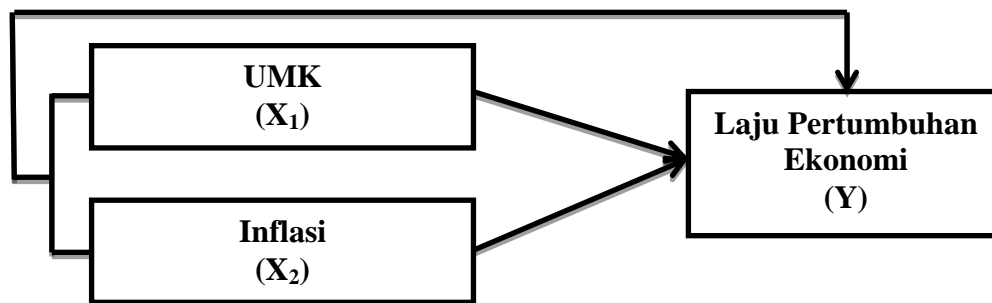
⁶² Erika Feronika Br Simanungkalit, Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (*Journal of Management (SME's)* Vol. 13 No. 3, 2020), hlm. 338

E. Kerangka Konseptual

Berikut kerangka konseptual penelitian dengan judul “Pengaruh tingkat upah minimum dan inflasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Kediri.”!

Gambar 4.3

Kerangka Konseptual



Keterangan:

X₁ = Tingkat Upah Minimum

X₂ = Inflasi

Y = Laju Pertumbuhan Ekonomi